

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Ali, Achmad. 1998. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti & Achmad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Santoso Az, Lukman. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2014. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Widodo. 2017. *Metode Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Nomor: 01/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Nomor: 02/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan dan Prosedur
Adjudikasi

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Nomor: 03/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

C. JURNAL

Agus Brotosusilo, makalah "*Aspek-aspek terhadap Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia*", dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998).

Ai Permanasari, *Akses Mendapatkan Keadilan Hak Konsumen atas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, *Dialogia Iuridica*, Vol X, No. 2, April 2019.

Artidjo Alkostar, "*Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia*", *Jurnal Hukum UII*, Vol. 11, No. 25, April 2004.

Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi dan Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019.

Dewi Tuti Muryati dan Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bidang Perdagangan*, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2011.

Marianus Gaharpahung. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, *Jurnal Yustika*, Vol.III No. 1 Juli 2000.

Nurmadjito, makalah "*Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*" dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2000).

Rahmi Yuniarti, *Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba*, *Fiat Justicia*, Vol. X, No. 3, September 2016.

Saptaji, *Kajian Hukum Proses Penyelesaian Sengketa Nasabah dan Bank pada Perspektif Kelembagaan Perlindungan Konsumen*, Hermeutika, Vol. 3 No. 1 Februari 2019.

Shidarta. *Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No. 1 Januari 2006.

D. WEBSITE

<https://lapspi.org>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2020, Jam 10.15.

<https://www.ojk.go.id>, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2020, Jam 11.05.

<https://www.bpkp.go.id>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2020, Jam 20.25.

<https://www.kemendag.go.id>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2021, Jam 19.41.

Shidarta, “*Kewenangan BPSK Versus LAPS-OJK*”, <http://www.business-law.binus.ac.id>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2020 Jam 21.05.

